Urgensi Adanya Saksi saat Cerai dan Relevansinya Terhadap Konsep *Maslahah Asy-Syathibi*

Muhammad Ariza Hafizhullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang

muhammadariza25@gmail.com

Abstrak:

Penulisan Artikel ini dilatar belakangi dari aturan yang berbeda, yakni syariat Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 76 ayat 1. Fokus penelitian pada artikel ini yakni tentang adanya saksi saat cerai adapun tujuannya yakni menggali data-data tertulis mengenai dasar dari undang-undang tersebut mengharuskan adanya saksi saat cerai sehingga membuatnya berbeda dengan syariat Islam yang tidak mengharuskan saksi saat cerai, artikel ini pula mengkaji keterkaitan saksi saat cerai dengan teori masalah dari *Asy-Syathibi*. Penelitian ini berjenis yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan filosofis logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya saksi saat cerai telah mendasar atau merujuk pada *Herzein Inlandsz Reglement (HIR)* dan *Rechtreglement voor de Buitengesten (RBG)*, keduanya merupakan undang-undang buatan penjajah Belanda yang masih diberlakukan dengan pertimbangan masih sesuai dengan kebutuhan hukum bagi penduduk Indonesia kemudian hasil penelitian mengenai relevansi saksi saat cerai terhadap teori masalah dari *Asy-Syathibi* yakni telah menunjukkan bahwa adanya saksi saat cerai merupakan representasi dari *masalah mursalah* sebab tidak ada dalil yang tertulis secara spesifik untuk menunjukkan larangan atau pembolehan, kendati demikian adanya saksi saat cerai merupakan upaya mendatangkan manfaat dan menolak *mafsadat* pasca terjadinya cerai.

Kata Kunci: Saksi; Cerai; *Maslahah Asy-Syathibi*.

Pendahuluan

Saksi merupakan salah satu unsur aturan yang harus dapat terpenuhi bagi setiap orang ketika dirinya mendaftarkan perceraian melalui jalur lembaga peradilan. Supaya senantiasa tercipta keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum pada proses peradilan maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menciptakan serta memberlakukan undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kini telah dirubah menjadi undang-undang nomor. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama. Artikel ini menganalisis mengenai undang-undang tersebut yakni pada pasal 76 ayat (1): Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tentang mengapa harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan yang bersumber dari saksi, bagaimana bisa terjadi demikian terhadap undang-undang peradilan agama yang notabene merupakan aturan untuk menyelesaikan perkara perdata bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia pada kenyataannya bertolak belakang dengan aturan pada syari'at Islam yang tidak mewajibkan adanya saksi ketika cerai. Artikel ini mengkaji pula keterkaitan adanya saksi saat cerai dengan teori atau konsep *al-maslahah* dari perspektif imam Asy-Syatibi.

Penelitian-penelitian terdahulu, petama Amirudin, A. Hamid, dan Syarifuddin Hasyim, *Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho)*, hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa landasan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum diunifikasi dalam satu undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sehingga Majelis Hakim menjadikan landasan hukum pembuktian dengan saksi dalam perkara perceraian, dari pendapat para ulama yang digali dari al-Qur'an, hadits nabi Muhammad SAW, pendapat pakar hukum, *Herzein Inlandsz Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengesten (RBG)*, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Yuris Prudensi, tidak semua alasan perceraian wajib dibuktikan dengan alat bukti saksi, kecuali alasan syiqaq yang wajib dibuktikan dengan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak suami-istri. Adapun kelebihanannya: Mahkamah Syar'iyah Jantho pada perkara perceraian sudah menerapkan pembuktian sebagai upaya untuk menggali penyebab dibalik terjadinya perceraian, pembuktian dapat dilakukan dengan berbagai macam alat bukti, khusus pada perceraian dengan alasan syiqaq pembuktiannya wajib menggunakan alat bukti saksi. Kekurangannya: landasan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum diunifikasikan dalam satu undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah¹.

Kedua, Leny Maria Ulfa, *Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa madzhab Syi'ah Imamiyah mensyaratkan saksi sebagai syarat sah didalam ikrar talak dan termasuk kedalam masalah al-hajiyah atau penyempurna kemaslahatan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Kelebihanannya: Madzhab Syi'ah Imamiyah termasuk relevan dengan aturan undang-undang di Indonesia yang tujuannya untuk menjamin hak nafaqah istri. Adapun kekurangannya: Tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidak mengenai saksi didalam talak².

Ketiga, Nur Adzimah, *Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab Dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa telah terjadi ikhtilaf dikalangan Imam Mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali bersepakat bahwa didalam perkara cerai perempuan tidak boleh menjadi saksi seorang diri, ia harus didampingi oleh laki-laki, berbeda dengan mazhab Hanafi yang

---

¹ Amiruddin, A. Hamid Sarong, Syarifuddin Hasyim, "Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian: Studi Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho" no. 2 (2014): 7

<http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/download/4595/3967>

² Leny Maria Ulfa, "Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

http://digilib.uinsby.ac.id/23645/1/Leny%20Maria%20Ulfa_C91214131.pdf

berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi meskipun tanpa laki-laki, sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia kesaksian laki-laki setara dengan kesaksian perempuan³. Kelebihannya, hukum positif di Indonesia telah mengedepankan kesetaraan gender serta hak asasi manusia sehingga tidak berbeda antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan. Kekurangannya, terjadi perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam, didalam hukum Islam kesaksian perempuan merupakan setengah dari kesaksian laki-laki, sedangkan hukum positif di Indonesia menyetarakan antara kesaksian perempuan dengan kesaksian dari laki-laki.

Keempat, analisis *Maslahah Terhadap Pendapat Mazhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak*, dalam Analisisnya menyatakan bahwa mazhab Syiah Imamiyah mensyaratkan ada saksi saat talak, tujuannya demi menjamin adanya hak *nafaqah* isteri, baik itu *nafaqah mut'ah* ataupun *nafaqah iddah*. Kelebihannya: bahwa dengan adanya saksi, akan terantisipasi terjadinya kesertamertaan dari suami atau isteri untuk hanya sekedar bercerai tanpa latar belakang konflik rumah tangga, mengingat perkawinan merupakan komitmen suami isteri untuk menjadikan keluarganya harmonis.⁴

Metode

Penelitian pada artikel ini berjenis yuridis normatif dan objeknya ialah saksi yang menjadi salah satu unsur yang harus dapat terpenuhi oleh para pihak saat terjadi cerai kemudian dikaitkan terhadap teori masalah dari Asy-Syathibi, pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif dan filosofis logis adapun Sumber data primer berasal dari undang-undang nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) pasal 163, 169, 171, RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) pasal 306, 308 dan sumberdata sekunder yakni bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal yang beresensikan penjelasan perihal adanya saksi saat cerai, artikel ini memakai metode studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, kemudian menganalisisnya dengan teknik yang terdiri atas *editing* yakni pemeriksaan, *classifying* yakni klasifikasi, *analyzing* yakni analisa, dan *conlusing* yakni pengintisarian.

Urgensi keberadaan Saksi dalam Perceraian

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama pasal 76 ayat (1) menyatakan apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *Syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Dalam undang-undang Peradilan Agama yakni undang-undang nomor. 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagian penjelasan umum tentang pasal 76 ayat 1, menyebutkan bahwa *syiqaq* adalah “perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan isteri”.

---

³ Nur Adzimah, “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian Analisis Perbandingan pendapat empat Imam Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia” (Undergraduate Theses, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30018/1/NUR%20ADZIMAH-FSH.pdf>

⁴ Lenny Maria Ulfa, “Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak” (Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), http://digilib.uinsby.ac.id/23645/1/Leny%20Maria%20Ulfa_C91214131.pdf

Redaksi atas esensi undang-undang tersebut telah mengkhususkan adanya saksi hanyalah pada gugatan perceraian dengan alasan syiqaq sehingga tidak berlaku pada perkara cerai yang bukan disebabkan oleh syiqaq, pihak penggugat dan tergugat harus dapat menyanggupi hadirnya saksi-saksi yang akan memberi keterangan bahwa benar-benar telah terjadi syiqaq antara suami dengan isteri atau antara pihak penggugat dengan pihak tergugat, saksi dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq disyaratkan supaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bukan mengada-ngada dalam arti keterangan palsu.

Ketika kedua belah pihak telah dapat menghadirkan saksi-saksi saat proses cerai atas alasan syiqaq dan saksi-saksi itu telah memberi keterangan tentang fakta yang sesungguhnya atas latar belakang gugatan perceraian, kemudian yang menjadi tahapan lanjutannya yakni penjatuhan putusan kepada pihak penggugat dan tergugat mengenai apakah status perkawinan mereka akan terputus atau tidak, hal itu dilakukan atas pertimbangan dari keterangan saksi-saksi dan merupakan otoritas hakim. Apabila terjadi cerai yang dilakukan tidak melalui proses peradilan, baik pada lembaga Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama maka status perceraian itu tidak diakui oleh negara. Senada dengan penjelasan Subekti didalam buku karangannya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata “pemutusan status perkawinan antara suami dengan isteri yang dilakukan di lingkungan peradilan sebab putusan hakim atau yang bersumber dari tuntutan salah satu pihak, merupakan makna dari kata perceraian”.⁵

Dalam hal perceraian, perundang-undangan di Indonesia adalah perundang-undangan yang menganut asas mempersulit atau mempersukar adanya perceraian, terdapat dalam penjelasan umum undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini mempersukar terjadinya perceraian. karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakanginya serta harus dilakukan di depan Pengadilan. Asas mempersulit terjadinya perceraian yakni suatu asas yang menerapkan agar perceraian tidak terjadi dengan mudah namun harus dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu prinsip asas mempersulit perceraian ini haruslah dilakukan di depan pengadilan serta dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur oleh pemerintah.⁶

Menurut hukum positif cerai terbagi menjadi dua jenis, pertama yakni cerai talak yang mana cerai diajukan oleh suami terhadap isterinya ke lembaga pengadilan dan kedua jenis cerai gugat, ia merupakan jenis perceraian karena penggugat (isteri) yang telah mendaftarkan atau mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui lembaga pengadilan kemudian diputus oleh hakim lalu mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat⁷.

Salah satu penyebab dari terjadinya cerai gugat di lingkungan Pengadilan agama yakni Syiqaq, kata syiqaq sendiri bermakna telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran atau perselisihan dalam hubungan perkawinan yang terjalin antara isteri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat, hal itu bermula

---

⁵Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermesa, 1983), 42.

⁶Arippuddin, Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian, Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh (Undergraduate theses, Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1052/1/Aripuddin.pdf>

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

dari keduanya (isteri dan suami) yang berlangsung secara berkelanjutan kemudian tidak akan ada harapan untuk dapat menjadi keluarga yang hidup dengan kerukunan.

Perceraian yang berasal baik dari kehendak salah satu pihak maupun dari kehendak kedua belah pihak yang sudah tidak dapat memiliki rasa kerukunan didalam ikatan perkawinan, pada prinsipnya merupakan urusan pribadi mereka sebagai suami isteri dan seharusnya tidak perlu ada campur tangan dari pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pemerintah namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa didalam konsep hukum positif, hal ini adalah bentuk upaya pemerintah demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negaranya dan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu pihak maupun kesewenang-wenangan dari kedua belah pihak,⁸ selain itu tertulis pada undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 39 sampai pada pasal 41 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. bagi siapapun yang akan bercerai sepatutnya untuk melakukan perceraian dengan mengikuti tahapan demi tahapan prosedur perceraian yang berlaku yaitu, dengan di sidangkan-nya perkara perceraianya pada “pengadilan agama” bagi mereka yang beragama Islam, atau disidangkannya perkara perceraian pada “pengadilan negeri” bagi siapa saja yang beragama selain Islam.

Berkaitan dengan landasan atau acuan atas perintah untuk dapat menghadirkan saksi bagi para pihak pada ayat 1 pasal 76 undang-undang nomor 50 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengharuskan adanya saksi pada gugatan perceraian yang disebabkan oleh *syiqaq*, telah dianalisis dari berbagai data-data tertulis yang menyatakan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang menjadi penguat dalam proses pembuktian demi mengungkap kebenaran dari hal yang diperkarakan. Dijelaskan pada *Herzein Inlandsz Reglement* (HIR) pasal 163: Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu haknya atau untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu. Saksi dihadirkan untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang, praktik persidangan di Pengadilan yakni dengan menggunakan dua orang saksi, supaya memperkuat pembuktian, maksud atau tujuan dihidirkannya dua orang saksi dalam proses pembuktian adalah agar hakim dapat mencocokkan keterangan-keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya sehingga akan tampak kesamaan atau tidak.

Seorang saksi akan menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya, kesaksian tersebut harus disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Menurut HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) pasal 169, RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) pasal 306: Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka pengadilan. Asas dari aturan tersebut adalah *Unus Testis Nullus Testis*, satu orang saksi adalah bukan saksi. Jika suatu dalil dibantah di muka pengadilan, sedangkan pihak yang mengemukakan dalil itu hanya dapat mengajukan satu orang saksi tanpa bukti lainnya, maka hakim tidak boleh menganggap dalil itu terbukti, namun aturan tersebut tidak melarang hakim untuk menganggap suatu peristiwa yang tidak didalilkan terbukti dengan keterangan seorang saksi.

Kesaksian harus didengar, dilihat dan dialami sendiri disertai alasan-alasan pengetahuannya, sebagaimana ditulis dalam HIR (*Herzein Inlands Reglement*) pasal 164 dan RBG (*Rechtsreglement voor de buitengewesten*) pasal 284, keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, harus terbatas pada

---

⁸Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.

peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan sebagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain atau hanya merupakan kesimpulan saja dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri saja tidak cukup. Suatu kesaksian supaya dianggap sah harus dikemukakan di depan persidangan pengadilan, bukan dihadapan polisi, jaksa, kecuali ditentukan undang-undang lain, serta saksi tersebut harus disumpah terlebih dahulu.

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim didalam persidangan secara lisan dan oleh pribadi yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis. Jika saksi tidak hadir dalam persidangan, padahal dirinya sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka ia harus dikenakan sanksi berupa membayar biaya yang telah dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu. kecuali tidak hadirnya saksi di dalam persidangan itu karena suatu sebab yang sah, pengadilan dapat menghapus hukuman itu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 140-142 HIR dan pasal 166-168 RBG.

Kesaksian yang hanya bersumberkan dari cerita orang lain maka perlu didengar keterangannya oleh hakim, walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk yang penilaiannya diserahkan kepada hakim.⁹ Berdasarkan HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) pasal 171 ayat (2) jo RBG (*Rechtsreglement voor de buitengewesten*) pasal 308 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.

Setiap orang yang ditunjuk menjadi saksi harus memenuhi kewajibannya sebagai saksi sebelum memberikan keterangan dimuka sidang pengadilan. Ada tiga kewajiban bagi seorang saksi, yaitu: (1) Kewajiban untuk menghadap. Apabila pada hari yang ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia akan dihukum membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan akan dipanggil sekali lagi sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 HIR jo pasal 166 RBG. Namun apabila saksi bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memanggil, maka tidak ada kewajibannya untuk hadir. (2) Kewajiban untuk bersumpah. Apabila saksi tidak mengundurkan diri sebelum memberikan keterangan harus disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 HIR atau pasal 175 RBG, bagi saksi yang tidak mau disumpah, sedangkan sumpah tersebut menjadi dasar bagi kesaksiannya bahwa apa yang akan dikemukakannya itu benar, atau tidak mau memberi keterangan, maka saksi tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang memintanya. Akan tetapi, apabila agama yang dianut saksi melarang mengucapkan sumpah, maka sebagai gantinya dapat dengan mengucapkan janji yang fungsinya persis sama dengan sumpah. (3) Kewajiban untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Dalam hal ini hakim atas keyakinannya bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada kebenaran. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai saksi tersebut bersedia memberikan keterangan yang benar sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 148

---

⁹ Novita Dyah Kumala Syafrudin Yudowibowo, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt", *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, No. 3 (2016): 151. jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38773/25654

HIR dan pasal 176 RBG. Jika saksi-saksi yang dipanggil memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah, maka dapat dituntut karena melaksanakan sumpah palsu.

Relevansi adanya Saksi Pada Perceraian dengan Konsep Masalah Dari Asy-Syathibi

Asy-Syathibi bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati asy-Syathibi, akrab dipanggil dengan sebutan Asy-Syathibi karena keluarganya berasal dari kota Syatiba' sebelum mereka kemudian berpindah ke Granada, Syathibi lahir di Granada pada tahun 730 Hijriyah dan wafat pada tahun 790 Hijriyah di kota yang sama. Dirinya terkenal karena teori atau konsepnya mengenai *masalah mursalah*.

Kata *masalah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'il* (*verb*) "*Shaluha*" lalu terserap kedalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*. Kamus besar bahasa Indonesia membedakan antara kata *masalahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *masalahat* menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna.¹⁰ Asy-Syathibi mengemukakan bahwa *masalah* adalah perbuatan mendatangkan manfaat yang ditemukan pada kasus baru, tidak ditunjuk oleh dalil tertentu yang berdiri sendiri tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*), mengandung *kemaslahatan* yang sejalan (*al-munasib*) dengan tujuan *syara*. *Maslahah* menurut Syathibi telah dipilahnya menjadi tiga macam. Pertama, *masalah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syara'*. Para ulama membenarkan *masalah* seperti ini. Dengan kata lain, *masalah* kategori pertama ini diterima karena penunjukkannya didasarkan pada dalil *syara'*. Contoh dari *masalah* ini adalah hukuman *qishah* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

Kedua, *masalah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara'*. Ditolaknya *masalah* ini karena *masalah* yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. *Maslahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Ketiga, *masalah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. Untuk *masalah* seperti ini ada dua kemungkinan yakni: Pertama, ada *nash* yang mengkonfirmasi kesejalan dengan *masalah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut; kedua, *masalah* yang sejalan dengan *syara'* secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan *masalah mursalah*. Dengan kata lain, setiap *masalah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang *kemaslahatannya* tidak dijelaskan oleh *nash* tertentu tetapi sejalan dengan tindakan *syara'* secara universal maka *masalah* itu menjadi benar, sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum. Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya baik dibenarkan maupun ditolak dan mengandung *kemaslahatan* yang diputuskan dengan *masalah mursalah* hanyalah berkaitan dengan masalah-masalah seputar kegiatan muamalat, bukan berkaitan dengan kegiatan ibadah. Alasan dari Asy-Syathibi tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah seputar kegiatan muamalat

---

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 23 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/maslahat>

adalah karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya.¹¹

Asy-Syathibi menerangkan pula bahwa menurut Imam Malik dalam hal adat kebiasaan sangat lepas jika memahami makna yang bersifat masalah, selama tidak keluar dari maksud syariat. Apabila suatu hal persyaratannya disebutkan dalam *nash* maka hal tersebut bersifat aqli atau adat kebiasaan. Masalah Mursalah penggunaannya menurut Asy-Syathibi terbatas hanya pada sifatnya yang dharuri, maksudnya adalah menjaga kepentingan-kepentingan yang hakikatnya ada dalam kehidupan, misalnya menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga harta. Yang kedua, sifat haji maksudnya adalah sesuatu yang dibutuhkan apabila tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan atau menghilangkan hal-hal yang memberatkan.¹²

Ditinjau dari keterkaitan mengenai adanya saksi saat cerai yang diatur didalam pasal 76 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui sehingga menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan konsep *masalah mursalah* dari pemikiran Asy-Syathibi, seyogyanya terlebih dahulu diketahui bersama bahwa menurut ketentuan hukum Islam, *talak* (cerai) adalah termasuk salah satu hak suami. Allah Subhana Wa ta'ala menjadikan hak *talak* ditangan suami, tidak menjadikan hak *talak* berada ditangan orang lain sekalipun orang itu isterinya sendiri apalagi kepada saksi ataupun pengadilan. Hal ini karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada isteri dan pada umumnya laki-laki lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara terlebih mengenai rumah tangga, seorang laki-laki lebih jauh dari kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan dampak keburukan yang besar baginya terlebih bagi keluarganya.

Dalam surat al Ahzab, ayat 49, Allah Subhana Wata'ala berfirman: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu menjadi isterinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada ditangan suami.

Dalam hal kesaksian saat talak, mayoritas para fuqaha berpendapat bahwa menyaksikan talak merupakan hal yang disunnahkan (*mandub ilaih*). Sementara mengenai jatuhnya talak, hal itu tidak tergantung pada kesaksian. Sebab menurut mereka, kesaksian bukanlah syarat jatuhnya talak. Tidak ada ketentuan dari Rasulullah dan para sahabat, bahwa kesaksian merupakan syarat sah agar talak dinyatakan sah. Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikah, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah dan para sahabatnya tentang sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.

---

¹¹ Imron Rosyadi "Pemikiran Asy-Syathibi tentang Masalah Mursalah" *Profetika*, No. 1 (2013): 86. journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2009/1427

¹² Asy-Syathibi, *Al Isthisham*, jilid II, terj. Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur Huda (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 618-625.

Dalil dan alasan disyariatkannya persaksian hanyalah dalam kegiatan bermuamalah yakni jual-beli. hukum memberikan kesaksian pada kegiatan ini adalah *fardhu'ain* bagi orang yang mengembannya ketika dia dipanggil untuk memberikannya dan dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak. Hukumnya bahkan wajib apabila dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak meskipun dia tidak dipanggil untuk memberikannya, dasar hukum mengemukakan kesaksian telah diatur dalam Al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 282:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah Subhana Wata'ala dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah mu'amalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah Subhana Wata'ala; Allah Subhana Wata'ala mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menerangkan bahwa tidak diterima kesaksian perempuan kecuali kalau bersama dengan laki-laki pada kegiatan muamalah jual beli.¹³ Dari data-data yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa analisis relevansi tentang adanya saksi saat cerai yang diberlakukan pada proses peradilan Agama di Indonesia telah berkaitan dengan masalah mursalah menurut konsep Asy-Syathibi. Masalah merupakan setiap sesuatu, apa saja yang terdapat manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan kebaikan, maupun untuk menolak kemudlaratan maka semua itu disebut dengan masalah, begitu pula halnya dengan adanya saksi-saksi saat perceraian, merupakan upaya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan (*mudlarat*), saksi-saksi itu akan memberikan keterangan kesaksian, latar belakang yang menyebabkan penggugat mendaftarkan gugatannya ke lembaga peradilan, sehingga akan terungkap fakta telah terjadi syiqaq atau tidak dalam rumah tangga suami isteri yakni antara penggugat dan tergugat itu.

Tidak terdapat dalil yang mengatur secara spesifik tentang harus adanya saksi-saksi guna memberi keterangan kesaksian saat terjadi *talak*. Agama Islam memberikan kewenangan sepenuhnya kepada lakilaki (suami) apabila ia hendak mentalak isterinya, talak dijadikan ditangan laki-laki bukan ditangan perempuan karena laki-laki yang membayar mahar, yang memberikan nafkah dan rumah, menjadikan laki-laki pada umumnya lebih dalam memperhatikan konsekuensi pasca terjadi cerai. Sebaliknya jika perempuan memiliki hak untuk mentalak bisa jadi hanya dengan permasalahan sederhana dirinya akan menjatuhkan talak. Kewenangan laki-laki terhadap perempuan telah Allah Subhana Wata'ala jelaskan didalam Qur'an surat al Ahzab ayat49:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka

---

¹³Faisal Yahya, "Wani Maulida Alsa, Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh," *Media Syari'ah*, No. 2 (2018): 251

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6517>

sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Penjelasan dari dalil diatas yakni apabila laki-laki menikahi perempuan kemudian menjadi pasangan suami isteri maka suami telah memiliki kuasa sepenuhnya terhadap isteri, bersamaan dengan hal itu melekat pula kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya akan tetapi suami yang tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan nafkah mempunyai hak untuk melepaskan isterinya dalam arti menceraikannya, sehingga aktivitas menikah bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada ditangan suami. Adanya saksi dalam persidangan talak merupakan kemaslahatan yang manfaatnya kelak dirasakan oleh isteri yang telah diceraikan dan terhadap anak-anaknya supaya tetap terjamin hak nafaqah, kemaslahatan dari adanya saksi saat *talak* ikut pula dirasakan oleh majelis hakim pada proses perceraian suami-isteri yang diselenggarakan di dalam lembaga peradilan Agama karena adanya saksi saat cerai akan memberikan keterangan yang menjelaskan bahwa didalam kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut telah terjadi ketidak harmonisan yang bermula dari keduanya lalu berujung pada perselisihan secara terus-menerus atau syiqaq.

Kesimpulan

Pasal 76 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang esensinya mengharuskan supaya pihak penggugat dan tergugat dapat menghadirkan saksi pada saat proses cerai yang didaftarkan dengan latar belakang telah terjadi syiqaq. Undang-undang tersebut mengharuskan adanya saksi agar dapat didengarkan keterangan dari kesaksiannya didepan hakim sebagaimana aturan HIR dan RBG yang menjelaskan apabila seseorang merasa mempunyai hak pada suatu perkara maka ia harus meyakinkan hakim dengan upaya membuktikannya. Sebagai bentuk undang-undang peninggalan Belanda, HIR dan RBG eksistensinya hingga kini masih dirasakan, hal itu tentunya atas pertimbangan kesesuaian atas kebutuhan hukum bagi penduduk Indonesia. Saksi disaat perceraian juga dirasa relevan ketika dikaitkan dengan konsep masalah dari Asy-Syathibi hal itu berdasarkan dari perspektifnya, bahwa al-maslahah merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka mengharapkan timbulnya suatu kebaikan, dengan adanya saksi maka saksi itu akan memberikan keterangan kepada hakim tentang benar atau tidak telah terjadi syiqaq pada rumah tangga suami isteri, sehingga suami atau isteri tersebut tidak dengan mudahnya mendaftarkan diri mereka untuk cerai atau dengan keserta mertaan semata.

Sebagai saran untuk penelitian normatif selanjutnya supaya dapat lebih menggali lagi mengenai berbagai aturan yang dicantumkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia kemudian direlevansikan atas teori atau konsep dari tokoh-tokoh Islam, tujuannya untuk berkontribusi didalam menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada setiap orang yang dirinya haus akan wawasan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, A. Hamid Sarong, Syarifuddin Hasyim. "Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian: Studi Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho" no. 2 (2014): 7.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/download/4595/3967>
- Ulfa, Maria Leny. "Analisis Masalah Terhadap Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
http://digilib.uinsby.ac.id/23645/1/Leny%20Maria%20Ulfa_C91214131.pdf
- Adzimah, Nur. "Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian Analisis Perbandingan pendapat empat Imam Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", Undergraduate Theses, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30018/1/NUR%20ADZIMAH-FSH.pdf>
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermesa, 1983.
- Arippuddin. "Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian, Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh", Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1052/1/Aripuddin.pdf>
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Yudiwibowo Novita Dyah Kumala Syafrudin. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt", Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, No. 3 (2016): 151.
jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38773/25654
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 23 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/maslahat>
- Imron Rosyadi "Pemikiran Asy-Syathibi tentang Masalah Mursalah" *Profetika*, No. 1 (2013): 86. journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2009/1427

Asy-Syathibi, "*Al Isthisham*", jilid II, terj. Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur Huda. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Faisal Yahya, "Wani Maulida Als, Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak Anallisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh," *Media Syari'ah*, No. 2 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6517>